

STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI

Tjutju Fatimah*

ABSTRACT

Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises is the largest group of economic actors in the Indonesian economy and proved to be a safety valve of the national economy and become dynamist economic growth in addition to being the largest business sector contribution to national development and also create job opportunities so that it is helping to reduce unemployment. Creation of business and investment climate that is conducive to improved governance through institutional Micro, Small and Medium Enterprises and the formulation of policy and its implementation, besides its development program is directed at market-oriented program that is based on considerations of efficiency and the real needs (market oriented, demand-driven program) that will generate sustainable productivity growth. To obtain financing based on the feasibility of revamping and improving the business conducted entrepreneurial skills, organization, management, technical skills of business that was involved, the ability of innovation, financial management. Along the recovery of the banking sector, strengthening the financial sector, particularly banks in providing financing in terms of institutions, products, and financial markets to be able to provide financing with a larger number and type more with the procedures and requirements more easily. Microfinance its existence is necessary for the surrounding communities for consumption or for productive business.

Keywords: *Micro, Small and Medium Enterprises, Empowerment, Globalization.*

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami krisis ekonomi yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensional. Akibat krisis ekonomi tersebut banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di Indonesia mengalami kebangkrutan sehingga jutaan rakyat Indonesia kehilangan mata pencahariannya berakibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh

perusahaan. Penyebab kebangkrutan tersebut adalah karena naiknya ongkos produksi, namun di sisi lain penjualan barang mengalami penurunan karena lesunya daya beli masyarakat.

Kegagalan pola pembangunan ekonomi yang telah dilakukan pemerintah karena strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak mengutamakan prinsip membangun dari apa yang dimiliki rakyat dan apa yang ada pada rakyat, dengan titik berat

* Tjutju Fatimah. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

pembangunan yang berlandaskan pada pembangunan ekonomi rakyat namun lebih bertumpu pada konglomerasi usaha besar.

Pada tahun 2006, kontribusi UMKM dalam Produk Domestik Bruto (PDB) cukup besar yaitu 53,3 persen dengan laju pertumbuhan PDB UMKM pada tahun yang sama adalah sebesar 5,5 persen. Jumlah unit usaha UMKM yang mencapai 99,9 persen atau sebesar 48,9 juta unit usaha pada tahun 2006 telah menyerap tenaga kerja UMKM sebanyak 85,4 juta pekerja. Sementara itu, jumlah koperasi pada tahun 2006 telah mencapai 140 ribu unit yang tersebar di seluruh propinsi, dengan anggota sebanyak 28,6 juta orang. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi sangat penting dan akan secara langsung memajukan kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia..

Hal tersebut kemudian membuat para perencana ekonomi untuk mendorong pemerintah agar mengalihkan upaya pembangunan dengan bertumpu pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat

membantu upaya mengurangi pengangguran.

PENGERTIAN UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di negara-negara berkembang sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri, seperti tingginya tingkat kemiskinan; besarnya jumlah pengangguran terutama dari golongan masyarakat berpendidikan rendah, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah-masalah urbanisasi dengan segala aspek negatif yang ditimbulkan (Tulus: 2002).

Menurut Departemen Perindustrian (1993) UMKM didefinisikan sebagai perusahaan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki total asset tidak lebih dari Rp 600 juta (diluar area perumahan dan perkebunan). Sedangkan definisi yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) lebih mengarah pada skala usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Usaha kecil menggunakan kurang dari lima orang karyawan, sedangkan usaha skala menengah menyerap antara 5-19 tenaga kerja.

Lebih lanjut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut kesepakatan bersama Menko Kesra selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Gubernur Bank Indonesia tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM No.11/KEP/MENKO/KESRA/IV/2002-

No.4/2/KEP.GBI/2002 Tanggal 22 April 2002 sebagai berikut:

- a) **Kredit Usaha Mikro:** kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro, baik langsung maupun tidak langsung yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin dengan kriteria penduduk miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b) **Kredit Usaha kecil:** kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun dengan plafon kredit maksimum sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c) **Kredit Usaha Menengah:** kredit yang diberikan kepada pengusaha di luar usaha mikro dan usaha kecil atau kepada pengusaha yang kriterianya akan ditetapkan kemudian dengan plafon di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

POTENSI UMKM

UMKM memiliki beberapa potensi unggulan antara lain: a) Sebagian besar usaha mereka menggunakan bahan baku lokal dan bersifat padat karya; b) Modal kecil dengan *time lag* cepat; serta c) Mampu memaksimalkan sumberdaya lokal karena dapat dilaksanakan di berbagai tempat sesuai dengan potensi daerah. Namun demikian pemberdayaan UMKM merupakan pekerjaan yang sangat besar dan rumit. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah UMKM yang menurut Biro Pusat Statistik (2007) telah mencapai lebih dari 48 juta unit usaha. Demikian juga UMKM tersebar dalam wilayah yang sangat luas, serta beragamnya jenis usaha yang dilakukan oleh UMKM. Salah satu masalah yang dihadapi dalam rangka pemberdayaan UMKM dalam era otonomi daerah sekarang ini adalah keragaman pemahaman tentang kepentingan pemberdayaan UMKM dalam rangka mengatasi masalah-masalah perekonomian nasional. Potensi UMKM memang perlu dikedepankan karena faktor inilah yang akan dijadikan andalan untuk membangun ekonomi bercorak kerakyatan yang diharapkan mampu mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Tabel 1
Jumlah Unit Usaha Menurut Skala Usaha di Semua Sektor

Skala Usaha	2003	2004	2005	2006
UMKM	43.460,3	44.777,44	47.102,8	48.929,6
UB	6,5	6,7	6,8	7,2
TOTAL	43.466,8	44.784,14	47.109,6	48.936,8

Sumber: BPS, 2006

Berdasarkan tabel tersebut sektor UMKM merupakan sektor terbesar dengan jumlah pertumbuhan yang besar. Jumlah usaha besar tersebut tentunya akan mampu menyerap atau menciptakan kesempatan kerja di Indonesia. Dua kelebihan UMKM yang dapat dijadikan dasar pemikiran dalam merancang strategi pemberdayaan kelompok ini adalah:

1) Penyebaran UMKM

Jumlah UMKM sangat banyak dan tersebar luas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian UMKM dapat dipandang sebagai *asset* nasional dan juga *asset* yang paling potensial bagi daerah, oleh sebab itu pemberdayaan UMKM merupakan salah satu wujud pemerataan pembangunan. Pemberdayaan UMKM bukan saja merupakan target pembangunan di tingkat pusat, tetapi juga merupakan bagian dari program-program pembangunan daerah, yang idealnya harus dimasukkan dalam kalkulus perencanaan pembangunan daerah.

2) Karakter UMKM

Sebagian besar kegiatan UMKM bersifat: a) Padat karya, sehingga tidak banyak memerlukan modal sebaliknya mampu menampung potensi sumber daya manusia; b) Tidak memerlukan teknologi tinggi sehingga berpeluang untuk dilaksanakan oleh kalangan yang berpendidikan terbatas (*non skill*); c) Banyak memanfaatkan sumberdaya lokal sehingga tidak banyak terpengaruh oleh gejolak perekonomian internasional, sebaliknya dapat merangsang pertumbuhan usaha lokal yang

berdampak luas pada optimalisasi pemanfaatan seperti lahan, hasil-hasil pertanian tambang dan bahan galian, produk sampingan hasil hutan, dll. Dengan demikian ketergantungannya pada produk-produk barang import relatif rendah; d) Selang waktu produksi (*time lag*) relatif singkat sehingga cepat menghasilkan produk; dan e) Produk barang bervariasi dari bahan mentah sampai dengan produk akhir. Sebagian produk UMKM merupakan bahan-bahan kebutuhan primer sedangkan sebagian lainnya merupakan barang-barang yang potensi pemasarannya masih cukup luas baik di dalam maupun di luar negeri.

STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM

Diperkirakan pertumbuhan dan peran UMKM akan semakin meningkat dalam perekonomian Indonesia yang disebabkan: a) Iklim investasi dan iklim usaha yang selama ini menjadi kendala, akan menjadi lebih baik dengan semakin seriusnya pemerintah mengatasi permasalahan yang menjadi faktor penyebab buruknya sistem investasi seperti KKN, penegakan dan kepastian hukum, perpajakan, ketenagakerjaan, serta pelayanan birokrasi baik di pusat maupun di daerah, b) Pemulihan sektor korporat atau perusahaan besar diperkirakan masih memerlukan waktu lama, karena permasalahan restrukturisasi yang kompleks termasuk permasalahan hukum, hutang luar negeri yang masih cukup besar dan perlu penjadwalan kembali dengan krediturnya, c) Dukungan pembiayaan

dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya diperkirakan juga semakin meningkat. Dunia perbankan akan cenderung memberikan kreditnya pada UMKM mengingat perusahaan besar masih banyak menanggung kredit macet, sehingga perbankan semakin bersifat hati-hati dalam kegiatan operasinya dan lebih memilih menyalurkan kreditnya pada UMKM yang usahanya lebih cepat memberikan hasil. Dengan optimisme pertumbuhan dan peran UMKM dan potensi pembiayaan kredit dari perbankan yang semakin baik, perlu dirumuskan dan dijabarkan implementasi strategi dan program yang jelas untuk mencapainya, yaitu dukungan yang dapat dilakukan pemerintah, Bank Indonesia, perbankan maupun lembaga keuangan non bank, dunia usaha serta masyarakat pada umumnya, agar UMKM benar-benar bisa menjadi pilar utama perekonomian. Peningkatan pembiayaan UMKM akan efektif paling tidak harus disertai strategi yang mencakup:

1) Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif

Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif dapat dilakukan melalui perbaikan tata kelembagaan UMKM dan perumusan kebijakan UMKM dan implementasinya, perbaikan kerangka pengaturan di tingkat nasional maupun daerah, peningkatan akses UMKM dan *stakeholder* terkait akses informasi. Lingkungan usaha yang tidak kondusif dari pengalaman selama ini telah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang menimbulkan inefisiensi.

Berbagai macam pungutan baik legal maupun ilegal, bermacam jenis perijinan yang tumpang tindih dengan birokrasi yang rumit, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme untuk memperlancar usaha, pelanggaran hak cipta, tidak terjaminnya keamanan menunjukkan wajah buruk iklim usaha di Indonesia yang berdampak lemahnya daya saing produk di samping Indonesia menjadi tidak kompetitif sebagai tempat investasi. Dengan demikian berbagai peraturan dan persyaratan administratif yang rumit dan menghambat kegiatan UMKM sebaiknya segera dihapus. Selain penciptaan lingkungan yang kondusif, program pengembangan UMKM hendaknya diarahkan pada program pengembangan yang berorientasi pasar, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan kebutuhan riil (*market oriented, demand driven program*), yang akan menghasilkan pertumbuhan produktivitas UMKM secara berkelanjutan, dan akan mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan. Secara terinci *The Asia Foundation (2000)* dalam Thee Kian Wie (2001) membagi fokus pengembangan UMKM baru yang berorientasi pasar dalam empat unsur pokok, yaitu: 1) Pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif; 2) Pengembangan lembaga-lembaga keuangan yang dapat memberikan akses kredit yang lebih mudah, murah atas dasar transparansi; 3) Pengembangan jasa-jasa non finansial yang lebih efektif; dan 4) Pembentukan aliansi strategis antar UMKM atau UMKM dengan usaha

besar di dalam negeri maupun luar negeri.

2) Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan

Untuk dapat memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun non bank yang mendasarkan pada kelayakan usaha, maka harus dilakukan pembenahan dan peningkatan kemampuan di pihak UMKM. Peningkatan kemampuan kewirausahaan, organisasi, manajemen, ketrampilan teknis usaha yang digeluti, kemampuan inovasi, manajemen keuangan seperti perencanaan keuangan, maupun kemampuan menyusun proposal kelayakan usaha sangat dibutuhkan guna menjadikan UMKM ataupun wirausaha dengan produktivitas dan daya saing tinggi. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kurangnya jumlah wirausaha dengan produktivitas dan daya saing yang tinggi. Upaya meningkatkan daya saing harus dimulai dari mengembangkan kewirausahaan dari para wirausahawan (pemilik dan pengelola unit usaha) yang telah ada serta menumbuhkan wirausaha atau minimal unit-unit usaha baru pada sektor-sektor yang produktif sesuai dengan potensi daerah. Pengembangan kewirausahaan juga diharapkan akan meningkatkan daya tahan bangsa, memperluas kesempatan kerja dan menanggulangi masalah kemiskinan, yang terbukti pada saat krisis ekonomi usaha kecil menengah dan koperasi yang mengandalkan bahan baku lokal dan memiliki keunggulan kompetitif

mampu bertahan dan bahkan berkembang. Kemauan masyarakat untuk menggeluti wirausaha sebagai penopang utama kehidupannya ditentukan oleh pemahaman masyarakat mengenai kewirausahaan, faktor sosial-ekonomi, budaya masyarakat, dan terbukanya kesempatan usaha. Hasil kajian Model Penumbuhan Usaha Baru yang dilakukan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK (2006) mengindikasikan sebagian besar responden obyek penumbuhan wirausaha ingin menjadi wirausaha, namun adanya pemahaman yang kurang 'pas' terhadap kewirausahaan menghambat mereka untuk mewujudkannya. Faktor penyebab ketidakinginan masyarakat menjadi wirausaha adalah merasa tidak mempunyai modal, merasa tidak berbakat, dan risiko bisnis terlalu besar. Upaya menyadarkan masyarakat (khususnya kelompok sasaran potensial, seperti: mahasiswa, generasi muda perlu terus dilakukan, terutama mengenai: (1) Modal bukan satu-satunya kunci sukses wirausaha, (2) Kesuksesan wirausaha lebih ditentukan oleh kejelian dan keuletan wirausaha daripada bakatnya, dan (3) Risiko usaha dapat diminimalisasi dengan cara membuat perencanaan bisnis yang baik. Kemampuan teknik dan kemampuan bisnis yang dimiliki masyarakat akan mampu mengubah peluang usaha menjadi usaha baru yang menguntungkan. Menurut persepsi responden, faktor yang harus dimiliki untuk menjadi wirausaha adalah pengalaman dibidangnya, modal yang kuat dan bakat bawaan.

3) Perkreditan Perbankan

Perkreditan perbankan yang selama ini harus dihadapi UMKM yaitu: 1) Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan baik dalam hal jumlah maupun waktu; 2) Kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan material sebagai salah satu persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha; 3) Tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih tinggi; 4) Kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya, sehingga meskipun di masa lalu pemerintah telah memberikan berbagai skim kredit bagi UMKM tetap saja skim-skim kredit tersebut tidak terjangkau. Sejalan telah pulihnya sektor perbankan, penguatan sektor keuangan khususnya perbankan dalam pemberian pembiayaan kepada UMKM perlu ditingkatkan, baik dari segi kelembagaan, produk, maupun pasar keuangan agar mampu menyediakan pembiayaan kepada UMKM dengan jumlah yang lebih besar dan jenis yang lebih banyak dengan prosedur dan persyaratan yang lebih mudah. Berkaitan dengan hal tersebut penguatan kredit untuk sektor UMKM saat ini menjadi fokus perhatian pemerintah, antara lain Presiden SBY turun langsung memimpin rapat koordinasi terbatas (Rakortas) dengan agenda "peningkatan sistem jaminan kredit bagi UKM" di kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM awal Maret 2007, dan meminta

penyaluran kredit untuk pengusaha kecil dapat dilakukan dengan cara paling mudah, tidak perlu adanya jaminan kredit, perbankan agar melonggarkan persyaratan kredit dan tidak mematok bunga kelewat tinggi. Dalam kesempatan ini Wapres menyatakan: Rakortas kali ini bertujuan menggerakkan sektor riil, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Untuk itu perbankan agar meningkatkan dan mempermudah kredit dengan aturan yang lebih rileks. Menindaklanjuti komitmen pemerintah agar performa kredit usaha kecil dan menengah meningkat, BI pada tanggal 2 April 2007 akhirnya mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yang intinya memperlonggar sejumlah persyaratan kredit perbankan bagi UKM. Pelonggaran meliputi tiga hal, yaitu: 1) ketentuan kredit bagi UKM dipermudah, bila selama ini kredit pada UKM harus memenuhi tiga syarat; yaitu prospek industri, sisi *balanced*, dan kemampuan membayar, maka kini dua persyaratan dihilangkan tinggal satu persyaratan yaitu kemampuan membayar; 2) pelonggaran mengenai pemberian kredit bagi perusahaan yang bermasalah, yaitu bila perusahaan bermasalah bukan karena kesengajaan tapi akibat situasi makro dan eksternal perusahaan misalnya terjadinya bencana alam, maka perusahaan tersebut boleh mendapat kredit; 3) kemudahan bagi perusahaan yang berada dalam induk perusahaan (*holding*) bermasalah, tetapi unit perusahaan dinilai sehat dan tak bermasalah, maka dapat diberikan

kredit . Dalam hal penjaminan kredit, menurut Gubernur BI pemerintah berkomitmen memperkuat posisi Askrindo. Untuk memperkuat modal Askrindo dan Perum SPU, pemerintah menyertakan modal sebesar Rp. 1,4 triliun. Dengan dana sebesar Rp. 1,4 triliun tersebut akan dapat menjamin total kredit sebesar Rp. 28 triliun. Dengan asumsi masing-masing UMKM membutuhkan dana Rp. 8 juta-Rp. 10 juta, maka akan dapat melayani 3,5 juta unit UMKM, dan jika diasumsikan setiap UMKM mempekerjakan satu orang maka akan dapat menyerap 3,5 juta orang tenaga kerja.

4) Penjaminan Kredit

Dalam hal ini, hanya UMKM yang memiliki usaha layak dan memiliki manajemen dan administrasi rapi yang akan cepat bisa memanfaatkan kredit perbankan. Dengan prasyarat seperti itu, maka tidak akan banyak pula UMKM yang dapat memanfaatkan kredit bank. Untuk itu, agar kemudahan kredit tersebut dapat optimal bisa dimanfaatkan UMKM masih perlu dukungan penjaminan kredit. Penjaminan keuangan adalah suatu perjanjian pihak ketiga untuk menutup sebagian dari potensi kerugian kepada pihak yang meminjamkan atas suatu pinjaman bila pinjaman tersebut tidak bisa dibayar penuh oleh peminjam. Di Indonesia telah beroperasi perusahaan penjaminan, yaitu: Perum Pengembangan Sarana Usaha (Perum Sarana), yang pada awal berdirinya (1971) merupakan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK), PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (PT PKPI),

PT ASKRINDO, yang selama ini sudah cukup membantu perkreditan UMKM, namun karena keterbatasan dana dan kemampuannya, layanan perusahaan penjaminan tersebut dirasakan masih sangat terbatas. Untuk itu pemerintah memandang perlu meningkatkan penjaminan kredit tersebut dengan menyediakan dana penjaminan kredit UMKM yang dimulai pada tahun 2002 dan Dana MAP Pola Penjaminan tahun anggaran 2001 dari eks BPS KPKM. Pada tahun 2003 Dana Penjaminan UMKM berjumlah Rp. 95 miliar Alokasi dana Penjaminan Kredit UMKM dari TA 2001 s.d. TA 2004 sebesar Rp. 260 miliar, dan meningkat dari tahun ke tahun mencapai Rp. 851 milyar lebih, pada pertengahan Januari 2008 dengan debitur sebanyak 2.768 UMKM. Program ini telah mendorong semakin besarnya minat menumbuhkan lembaga penjaminan kredit di daerah. Terdapat beberapa Dinaskop dan UKM tingkat propinsi yang mendorong tumbuhnya lembaga penjaminan kredit UMKM di daerah, seperti Propinsi Sumatera Selatan, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur, Dalam hal penjaminan kredit, untuk lebih mengoptimalkan kemudahan kredit perbankan untuk UMKM yang diluncurkan awal 2007, menurut Gubernur BI pemerintah berkomitmen memperkuat posisi Askrindo. Untuk memperkuat modal Askrindo dan Perum SPU, pemerintah akan menyertakan modal sebesar Rp. 1,4 triliun. Dengan dana sebesar Rp. 1,4 triliun tersebut akan dapat menjamin total kredit sebesar Rp. 28 triliun. Dengan asumsi masing-masing UMKM

membutuhkan dana Rp. 8 juta-Rp. 10 juta, maka akan dapat melayani 3,5 juta unit UMKM, dan jika diasumsikan setiap UMKM mempekerjakan satu orang maka akan dapat menyerap 3,5 juta orang tenaga kerja Berkaitan dengan pengoptimalan daya guna penjaminan kredit yang disediakan pemerintah, dari hasil penelitian Tim Peneliti Litbang Direktorat Perbankan Syariah Bank merekomendasikan agar program penjaminan pembiayaan UMKM dari pemerintah jangan hanya melibatkan 6 (enam) saja antara lain: Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI, melainkan juga seluruh Bank Syariah yang selama ini telah berkembang pesat, dan berdasarkan publikasi BI per September 2007 telah berjumlah 28 (dua puluh delapan) yang terdiri 3 (tiga) Bank Syariah Umum dan 25 Unit Usaha Syariah (UUS). Dukungan pemerintah untuk memberikan jaminan sangat dibutuhkan untuk mendorong perbankan syariah dapat mengembangkan sektor UMKM. Selain itu juga menyarankan agar Pemda tingkat propinsi maupun kodya/kabupaten juga mencanangkan program penjaminan pembiayaan syariah untuk UMKM di daerah masing-masing mengingat dana pemerintah pusat juga terbatas, yang diambilkan dari pos pemberdayaan masyarakat dalam APBD, yang mana dana tidak seluruhnya digelontorkan dalam program pengentasan kemiskinan, tetapi sebagian untuk program penjaminan.

5) Peningkatan Lembaga Keuangan Mikro dan Layanan KSP/USP Koperasi

Lembaga Keuangan Mikro (LKM atau *microfinance*) keberadaannya sangat dibutuhkan bagi masyarakat sekitarnya untuk keperluan konsumtif maupun UMKM untuk usaha produktif yang relatif tidak bisa menjangkau lembaga keuangan formal. Lembaga keuangan mikro jenisnya bermacam-macam, ditinjau dari sisi kelembagaan, tujuan pendirian, budaya masyarakat, program pemerintah atau sasaran lainnya. Secara umum, lembaga keuangan mikro di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu formal dan informal. Lembaga keuangan mikro formal terdiri dari bank seperti Bank Kredit Desa (BKD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BRI unit dan non bank seperti Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan (LDKP), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi/KUD, dan Pegadaian. Adapun lembaga keuangan mikro non formal antara lain berbagai kelompok dan Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM dan LSM), Baitul Maal wa Tanwil (BMT), Lembaga Ekonomi Produktif Mandiri (LPEM), Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UESDP), dan berbagai bentuk kelompok lainnya. Pengembangan LKM efektif bagi pelayanan permodalan UMKM karena beberapa merupakan sistem pembiayaan *grass root*, secara fisik dekat dengan nasabahnya sehingga benar-benar memberikan kemudahan, kecepatan pelayanan, dan kemudahan dalam pengawasan. Namun pengembangan LKM termasuk

KSP dan USP koperasi menghadapi beberapa permasalahan, baik permasalahan internal maupun eksternal, antara lain seperti terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia, manajemen, permodalan, masih kurangnya kepercayaan masyarakat, lemahnya jaringan (*networking*) dan inovasi dibidang pemasaran, terbatasnya teknologi informasi yang dimiliki, sistem dan prosedur operasional yang belum mapan, serta belum optimalnya pengawasan dan pembinaan dari otoritas yang berwenang. Dalam meningkatkan permodalannya meskipun kredit perbankan telah diperlonggar, atau ketentuan kredit bagi UMKM dipermudah, namun masih sangat banyak UMKM maupun LKM yang belum siap menjangkau, karena beberapa permasalahan yang dihadapi LKM seperti diuraikan diatas, maka program perkuatan permodalan pola dana bergulir melalui lembaga keuangan mikro (KSP/USP koperasi) yang telah dilaksanakan Kementerian Negara Koperasi dan UKM masih dilanjutkan. Program ini harus diposisikan sebagai stimulan, dengan tujuan meningkatkan lembaga keuangan mikro, yaitu meningkatkan layanan KSP/USP koperasi, sehingga mampu melayani kebutuhan permodalan UMKM anggotanya secara mandiri. Disamping perkuatan permodalan pola dana bergulir, untuk meningkatkan usaha dan pelayanan KSP telah dilakukan kerjasama penyaluran kredit bank umum kepada UMKM melalui koperasi yang disebut *linkage program*. Masuknya gerakan koperasi dalam *linkage program*

merupakan hal yang patut dibanggakan, karena hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan pada koperasi, tentu saja hanya koperasi yang kinerjanya baik yang terpilih dalam program ini dan dalam pelaksanaannya koperasi harus benar-benar menjaga amanah.

6) Pengembangan Pembiayaan Multifinance

Selain pengembangan pembiayaan sebagaimana diuraikan di atas masih ada beberapa sistem pembiayaan (*multifinance*) yang dapat dimanfaatkan UMKM, antara lain: modal ventura, anjak piutang (*factoring*), *penyewaan (leasing)*, pegadaian, dana BUMN dan sebagainya. Pemilihannya tergantung UMKM sendiri, berdasarkan kesesuaian, kemampuan pemenuhan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan masing-masing lembaga pembiayaan tersebut. Modal ventura merupakan salah satu program Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan telah berkembang di daerah-daerah, hampir disetiap propinsi/daerah istimewa telah berdiri Perusahaan Modal Ventura Daerah (LMVD) yang menyediakan modal produktif bagi UMKM.

STRATEGI UMKM DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI

Resesi multidimensional yang melahirkan era reformasi juga telah memberikan pengalaman kepada bangsa Indonesia bahwa peran UMKM dalam perekonomian nasional perlu diperhitungkan, oleh sebab itu dalam menghadapi ekonomi global UMKM

juga harus bersiap diri. Salah satu persiapan yang perlu mendapatkan perhatian adalah perbaikan produktifitas UMKM dengan penerapan teknologi khususnya teknologi tepat guna yang tetap dapat mempertahankan kriteria UMKM sebagai kelompok usaha yang bersifat padat karya.

Faktor lainnya yang juga perlu dikembangkan dalam rangka menghadapi persaingan pasar yang akan semakin ketat adalah pembentukan jaringan usaha yang harus dibangun melalui usaha penguasaan informasi dan komunikasi usaha. Kedua aspek usaha tersebut memang dapat dikembangkan sendiri oleh UMKM bila UMKM berada dalam kondisi yang optimal dalam arti kata kondisi internalnya telah cukup kuat dan lingkungan UMKM cukup kondusif. Kemampuan internal UMKM dimungkinkan bila kelompok ini memiliki kekuatan permodalan dan SDM. Sedangkan dari aspek eksternal lingkungan ekonomi dan politik cukup kondusif. Konsepsi ke arah pengembangan penguasaan informasi dan pengembangan teknologi produksi juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Untuk membantu mengembangkan informasi dan jaringan usaha pemerintah telah memperkenalkan konsep sentra dan kluster bisnis sedangkan untuk pengembangan teknologi produksi pemerintah telah mensosialisasikan berbagai teknologi tepat guna. Memang yang telah diprogramkan oleh pemerintah tersebut hanya bersifat stimulan dan diharapkan UMKM bersama dengan masyarakat dapat

mengembangkannya sendiri, sesuai dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing.

Di sisi lain, perkembangan UMKM di Indonesia dihalangi oleh banyak hambatan; intensitasnya bisa berbeda di satu daerah dengan di daerah lain atau antara perdesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM di negara manapun juga, khususnya di Indonesia. Rintangan-rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas sumber daya manusia rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi; keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan ijin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan-peraturan dan kebijakan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu arahnya. Berdasarkan informasi paling akhir, walaupun terbatas untuk sejumlah negara, dari misalnya laporan-laporan pemerintah, survei-survei nasional, dan studi-studi kasus, menunjukkan bahwa ada sejumlah permasalahan yang umum dialami oleh UMKM di negara berkembang di Asia, walaupun derajatnya bervariasi menurut negara, tergantung pada perbedaan-

perbedaan dalam banyak aspek, seperti tingkat pembangunan UMKM, sifat alami dan derajat dari pembangunan ekonomi, kebijakan-kebijakan dan fasilitas-fasilitas publik, dan, juga tentu sifat alami dan intensitas dari intervensi-intervensi pemerintah terhadap perkembangan UMKM. Survei BPS 2003 terhadap UMKM di industri manufaktur menunjukkan permasalahan-permasalahan klasik dari kelompok usaha ini di Indonesia yaitu keterbatasan modal dan kesulitan pemasaran. Walaupun banyak skim-skim kredit khusus bagi pengusaha kecil, sebagian besar dari pengusaha UMKM terutama yang berlokasi di pedalaman/perdesaan tidak pernah mendapatkan kredit dari bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Mereka tergantung sepenuhnya pada uang/tabungan mereka sendiri, uang/bantuan dana dari saudara/kenalan atau dari sumber-sumber informal untuk mendanai kegiatan produksi mereka. Alasannya bisa macam-macam, ada yang tidak pernah dengar atau menyadari adanya skim-skim khusus tersebut, ada yang pernah mencoba tetapi ditolak karena usahanya dianggap tidak layak untuk didanai atau mengundurkan diri karena ruwetnya prosedur administrasi, atau tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan termasuk penyediaan jaminan, atau ada banyak pengusaha kecil yang dari awalnya memang tidak berkeinginan meminjam dari lembaga-lembaga keuangan formal. Dalam hal pemasaran, UMKM pada umumnya tidak punya sumber-sumber daya

untuk mencari, mengembangkan atau memperluas pasar-pasar mereka sendiri. Sebaliknya, mereka sangat tergantung pada mitra dagang mereka (misalnya pedagang keliling, pengumpul, atau *trading house*) untuk memasarkan produk-produk mereka, atau tergantung pada konsumen yang datang langsung ke tempat-tempat produksi mereka atau, walaupun persentasenya kecil sekali, melalui keterkaitan produksi dengan usaha besar lewat sistem *subcontracting*.

Berdasarkan hasil survei, hal yang menarik adalah walaupun sudah bukan rahasia lagi bahwa penyebab utama rendahnya produktivitas di UMKM di Indonesia adalah keterbatasan teknologi dan SDM. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaksadaran mereka bahwa produktivitas mereka rendah atau mereka menghadapi kesulitan pemasaran karena produk-produk yang mereka buat tidak kompetitif dibandingkan produk-produk yang sama buatan usaha besar atau impor, dan ini disebabkan terutama oleh rendahnya teknologi atau kualitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Ismawan. 2003. *Merajut Kebersamaan dan Kemandirian Bangsa Melalui Keuangan Mikro untuk Menanggulangi Kemiskinan dan Menggerakkan Ekonomi Rakyat*.
- Dawam Rahardjo. 2006. *Menuju Indonesia Sejahtera: Solusi Konkret Pengetasan Kemiskinan*.

- Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia.
- Didik. J. Rachbini. 2001. *Pembangunan Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2000. *Situasi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja di Indonesia*. Jakarta
- Ernan Rustiadi, dkk. 2008. *Agropolitan Strategi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Pada Kawasan Pedesaan*. Bogor: Crestpent Press.
- Effendi Ishak. 2005. Artikel: *Peranan Informasi Bagi Kemajuan UKM*. Kedaulatan Rakyat. Yogyakarta
- Harian Suara Merdeka, 27 Mei 2009. *Peran UMKM Ciptakan Kesempatan Kerja*. Jakarta.
- <http://agusyantono.wordpress.com/2010/09/03/pemberdayaan-koperasi-dan-saha-mikro-kecil-dan-menengah>.
- Mendegkop dan UKM. 2003.No.11/KEP/MENKO/KESRA /IV/2002-No.4/2/KEP. GBI/2002 Tanggal 22 April 2002.
- Soetrisno Noer, Manggara Tambunan, Ubaidilah, dkk. 2003. *Ekonomi Kerakyatan dalam Kancah Globalisasi*. Jakarta: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.